



*No Deforestation Joint Steering Group
(NDJSG)*

Kerangka Acuan
Terms of Reference (ToR)

Sekretariat RSPO
Januari 2019

No Deforestation Joint Steering Group (NDJSG) Kerangka Acuan

Isi

1 Pengantar	2
2 Visi, Misi dan Tujuan	4
2.1 Kelompok Pengarah Bersama (<i>Joint Steering Group</i>)	4
2.1.1 Visi	4
2.1.2 Misi	4
2.1.3 Tujuan	4
3 Struktur	5
3.1 Kriteria Keanggotaan dan Komposisi	5
3.1.1 Peran dan Tanggung Jawab	5
3.2 Kriteria untuk Pemberhentian/Pemilihan kembali Anggota Kelompok Pengarah Bersama yang tidak aktif	6
3.3 Pembubaran NDJSG	6
3.4 Tata Kelola.....	6
3.3.1 Komunikasi	7
3.3.2 Perencanaan	7
3.3.3 Proyek	7
3.5 Peran Sekretariat	8

Daftar Singkatan

BHCVWG	<i>Biodiversity, and High Conservation Values for Certification Working Group</i> Kelompok Kerja Keanekaragaman Hayati dan Nilai Konservasi Tinggi untuk Sertifikasi
BoG	<i>Board of Governance</i> Dewan Gubernur
EC	<i>Executive Committee</i> Komite Eksekutif
HFC	<i>High Forest Cover</i> Hutan Bertutupan Tinggi
HFCC	<i>High Forest Cover Countries</i> Negara-negara dengan Tutupan Hutan Tinggi
HFCL	<i>High Forest Cover Landscape</i> Bentang Alam/Lanskap dengan Tutupan Hutan Tinggi
HFCWG	<i>High Forest Cover Working Group</i> Kelompok Kerja Hutan Bertutupan Tinggi
HCSA	<i>High Carbon Stock Approach</i> Pendekatan Stok Karbon Tinggi
HCVRN	<i>HCV Resource Network</i> Jaringan Sumberdaya HCV
JWG	<i>Jurisdictional Working Group</i> Kelompok Kerja Yurisdiksi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NDJSG	<i>No Deforestation Joint Steering Group</i> Kelompok Pengarah Bersama Tanpa Deforestasi
NPP	<i>New Planting Procedure</i> Prosedur Penanaman Baru
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PLWG	<i>Peatland Working Group</i> Kelompok Kerja Lahan Gambut
P&C	<i>Principles & Criteria</i> Prinsip & Kriteria
SHIG	<i>Smallholder Interim Group</i> Kelompok Kerja Interim untuk Petani

1 Pengantar

Selama peninjauan Prinsip & Kriteria RSPO (P & C 2018), “tanpa deforestasi (*no deforestation*)” telah menjadi isu penting. Gugus Tugas Tinjauan P&C sepakat untuk memasukkan persyaratan baru untuk menghentikan deforestasi melalui penggunaan perangkat Pendekatan Stok Karbon Tinggi (*High Carbon Stock Approach/HCSA*) dalam standar yang direvisi untuk memastikan kontribusi efektif RSPO dalam mentransisikan sektor minyak kelapa sawit ke arah bebas deforestasi.

P&C RSPO 2018 mencakup persyaratan baru untuk memastikan kontribusi efektif RSPO dalam menghentikan deforestasi. Ini akan dapat dicapai dengan memasukkan perangkat HCSA dalam standar yang direvisi.

Teori Perubahan RSPO (*RSPO Theory of Change*) juga berkomitmen untuk menyeimbangkan mata pencaharian berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan ekosistem. Negara-negara dengan tutupan hutan yang tinggi sangat membutuhkan peluang ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih jalur pembangunan mereka sendiri, sambil memberikan manfaat dan perlindungan sosial-ekonomi.

Setelah berkomunikasi dengan Komite Eksekutif HCSA selama konsultasi publik ke-2 tentang P&C RSPO pada Juni-Juli 2018, ada pengakuan kuat akan kebutuhan dan keinginan RSPO untuk bekerja sama dengan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA) untuk memastikan bahwa persyaratan di sekitar Tanpa Deforestasi selaras dan harmonis.

Oleh karena itu diperlukan Kelompok Pengarah Bersama yang baru, yaitu 'Kelompok Pengarah Bersama Tanpa Deforestasi' (*No Deforestation Joint Steering Group/NDJSG*) dan kolaborasi bersama dengan inisiatif lain, khususnya HCSA, untuk memandu pengembangan dan implementasi prosedur, metodologi dan panduan untuk Kriteria 7.12, khususnya di sekitar negara dan bentang alam dengan tutupan hutan tinggi.

2 Visi, Misi dan Tujuan

2.1 Kelompok Pengarah Bersama (*Joint Steering Group*)

2.1.1 Visi

Visi NDJSG berupaya untuk menghentikan deforestasi dan memastikan kontribusi bersama yang efektif dari RSPO dan HCSA untuk mendukung sektor kelapa sawit dalam transisi menuju bebas dari deforestasi dan mencapai dampak positif dengan menyeimbangkan mata pencaharian berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan ekosistem dan menghormati hak-hak pengguna lahan.

2.1.2 Misi

NDJSG akan menjadi badan pusat dalam membahas dan memandu pengembangan kerangka kerja untuk implementasi dan keputusan tentang tidak adanya deforestasi di Lanskap dengan Tutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Landscape/HFCL*) di dalam Negara-negara Bertutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Countries/HFCC*)¹ dalam konsultasi dengan Masyarakat Adat, masyarakat lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di negara tersebut.

2.1.3 Tujuan

NDJSG akan mengawasi upaya untuk mencapai tujuan menyeluruh dan tugas-tugas penting strategis berikut ini:

- Mengembangkan, mendukung, dan memandu pelaksanaan prosedur Tutupan Hutan Tinggi (HFC) RSPO, termasuk menyarankan revisi terhadap P&C dan/atau panduan yang akan memungkinkan prosedur HFC untuk digunakan di HFCL dalam HFCC, jika di wilayah studi kasus mandat diberikan dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal kepada perwakilan di NDJSG untuk mengembangkan prosedur itu untuk tanah mereka.

- Mengembangkan perlindungan dan prosedur terkait untuk melindungi Penduduk Asli dan komunitas lokal yang merupakan pemegang hak atas tanah dengan Tutupan Hutan Tinggi dari paksaan, intimidasi atau kekerasan oleh anggota RSPO, pejabat pemerintah atau pemangku kepentingan lain yang dapat mengambil manfaat dari pengembangan pengecualian terhadap metodologi tanpa deforestasi yang dijabarkan dalam HCSA Toolkit atau P&C RSPO yang direvisi (7.12).
- Berusaha menyelaraskan pendekatan HCSA dan P&C RSPO terhadap kasus-kasus warisan yang berlokasi di HFCL dalam HFCC.
- Mengusulkan proses tata kelola untuk penerapan HFCL dalam persyaratan Prosedur HFCC di P&C RSPO yang telah disusun.
- Memberikan panduan tentang implementasi, daftar periksa audit dan tautan silang dengan praktik terbaik saat ini dari prosedur yang telah disusun.
- Mengembangkan rencana sosialisasi untuk memastikan partisipasi inklusif OMS lokal, masyarakat adat dan komunitas lokal:
 - Meminta mandat dari masing-masing pemegang hak tanah lokal di wilayah studi kasus untuk pengembangan prosedur untuk HFCL dalam HFCC.
 - Meminta masukan terhadap draft prosedur
 - Membagi usulan prosedur final untuk mendapatkan umpan balik sebelum diserahkan untuk pengesahan formal.
 - Sosialisasi akan mencakup informasi tentang opsi-opsi pembangunan lain selain kelapa sawit dan akan memberikan informasi tentang insentif dan dukungan yang tersedia bagi masyarakat yang bersedia mengidentifikasi dan memelihara hutan SKT.
- Mengkoordinasikan dan memperjelas peran kolaborasi dengan Kelompok Kerja RSPO terkait, termasuk namun tidak terbatas pada BHCVWG, PLWG2, JWG dan SHIG serta Kelompok Kerja HCSA, termasuk tetapi tidak terbatas pada Kelompok Kerja Warisan HFCLWG.
- Menginformasikan perubahan yang diperlukan untuk Prosedur Penanaman Baru (NPP) untuk memasukkan Kriteria 7.12.
- Mengajukan proses-proses terkait C7.12 kepada proses NI untuk Prosedur HFC yang telah selesai dikembangkan
- Memberikan panduan tentang pengembangan kapasitas dan prosedur untuk mengatasi ketidakpatuhan terkait dengan penerapan Prosedur HFC yang telah dikembangkan.

3 Struktur

3.1 Kriteria untuk Keanggotaan dan Komposisi

NDJSG akan terdiri dari anggota RSPO dan Kelompok Pengarah HCSA. Enam perwakilan RSPO akan mencerminkan komposisi sektoral dan geografis dari keanggotaan RSPO. Empat anggota secara kolektif akan mewakili produsen barang-barang konsumen, pengecer dan lembaga keuangan, pengolah & pedagang, pekebun dan dua akan mewakili LSM lingkungan dan sosial. HCSA akan diwakili oleh enam anggota dari lima kategori keanggotaan Grup Pengarah HCSA, termasuk dua LSM; anggota-anggota ini juga mungkin merupakan anggota RSPO.

¹ Untuk panduan dan rekomendasi yang berkaitan dengan HFCL di negara-negara non-HFC, NDJSG akan merujuk pada proses peninjauan kasus warisan HCSA. P&C yang direvisi mendefinisikan ruang lingkup hanya sebagai HFCL di negara-negara HFC. Kasus-kasus warisan di HFCL di luar HFCC saat ini ditangani melalui proses peninjauan kasus warisan HCSA yang terpisah, yang mencakup kerja bersama studi multi-pemangku kepentingan yang dipimpin oleh HCSA bersama dengan OMS dan perwakilan masyarakat lokal. NDJSG akan mengikuti pekerjaan ini dan dapat membuat rekomendasi untuk memasukkan hasil dari proses tersebut ke dalam standar dan prosedur RSPO. Setiap perubahan pada P&C RSPO harus mengikuti prosedur RSPO untuk pengaturan standar.

NDJSG akan diketuai bersama oleh dua anggota, satu perwakilan terpilih dari RSPO dan satu dari HCSA. Kursi ketua bersama tidak akan dipegang oleh organisasi yang terkait dengan kaukus yang sama oleh salah satu organisasi yang ditunjuk baik oleh anggota RSPO maupun HCSA.

OMS dalam negeri yang sesuai yang mendukung Penduduk Asli dan komunitas lokal serta lembaga atau pakar yang relevan, serta ahli HCVRN atau ahli hak asasi manusia, dapat diundang untuk berpartisipasi dan memberikan saran dan panduan sebagai pakar teknis. Mereka tidak akan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan apa pun.

Kandidat harus dicalonkan oleh konstituen dan disetujui oleh anggota NDJSG melalui konsensus. Keanggotaan dalam NDJSG adalah "institusional" dan bukan pribadi; perubahan status kepegawaian harus tercermin dalam komposisi komite. Partisipasi bersifat sukarela dan tanpa upah, tetapi penggantian untuk biaya perjalanan dapat dipertimbangkan untuk memfasilitasi partisipasi semua kelompok pemangku kepentingan.

Anggota diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses atas nama kaukus mereka dan memastikan mereka diwakili oleh pengganti yang ditunjuk jika mereka tidak dapat melakukan hal tersebut.

Tindakan: RSPO akan melibatkan fasilitator independen sebagaimana disepakati dengan HCSA.

3.1.1 Peran dan Tanggung Jawab

NDJSG didukung oleh Sekretariat RSPO dan akan melaporkan temuannya kepada Komite Dewan RSPO yang sesuai. Sekretariat HCSA dan / atau anggota HCSA yang diwakili akan melaporkan temuan NDJSG ke HCSA EC.

NDJSG akan menjadi badan pusat untuk membahas cara-cara pragmatis dan efektif untuk menyelaraskan dan mengimplementasikan keputusan tentang isu-isu seputar tanpa deforestasi di Lanskap dengan Tutupan Hutan Tinggi (HFCL) dalam Negara-negara HFC (HFCC) oleh RSPO dan HCSA. NDJSG akan mengoordinasikan pekerjaannya dengan Kelompok Kerja dan Gugus Tugas yang relevan dalam RSPO dan HCSA seperti BHCVWG, PLWG2, JWG dan SHIG di RSPO serta HFCWG di HCSA. NDJSG akan mengawasi program sosialisasi, meminta mandat dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal untuk mengembangkan prosedur yang dapat diterapkan pada tanah mereka, dan meninjau semua dokumen RSPO dan HCSA terkait mengenai implementasi Prosedur HFC sebelum direkomendasikan untuk diadopsi. Ia dapat menunjuk sub-komite untuk fokus pada komponen pekerjaan yang berbeda, termasuk untuk panduan implementasi teknis. Rekomendasi-rekomendasinya perlu disahkan oleh Komite BoG RSPO dan HCSA EC serta dikomunikasikan kepada kelompok kerja, gugus tugas, dan Sekretariat organisasi relevan, yang berasal dari Komite Pengarah Standar & Sertifikasi RSPO (*RSPO Standards & Certification Steering Committee*) dan Grup Pengarah HCSA (*HCSA Steering Group*).

Sekretariat RSPO akan menjadi koordinator utama dan saluran komunikasi antara NDJSG dengan kelompok kerja dan gugus tugas RSPO, serta masing-masing kelompok kerja HCSA melalui Sekretariat HCSA. Individu kunci (khususnya masing-masing Ketua atau Ketua bersama) dari kelompok kerja dan gugus tugas ini akan diundang untuk menghadiri pertemuan NDJSG bila perlu.

3.2 Kriteria untuk Pemberhentian/Pemilihan kembali Anggota Kelompok Pengarah Bersama yang tidak aktif

NDJSG dapat menggunakan hak untuk memberhentikan keanggotaan anggota SG. Namun, keputusan harus dibuat berdasarkan konsensus SG (tidak termasuk pihak yang terkena dampak).

Alasan (tidak lengkap) bagi SG untuk mempertimbangkan pengunduran diri anggota SG adalah:

1. Tidak hadir di pertemuan SG selama tiga pertemuan berturut-turut tanpa mengatur anggota pengganti (*alternate*) untuk menghadiri pertemuan ini..
2. Penolakan gigih untuk memberikan informasi secara tepat waktu sebagaimana diminta oleh SG. Informasi yang diminta, jika dianggap bermanfaat bagi tujuan SG, tidak akan ditahan secara tidak masuk akal kecuali bagi informasi yang sensitif secara komersial dan/atau dilarang oleh hukum untuk disebarluaskan.
3. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan untuk menyatakan dan bertindak dengan cara yang bebas dari konflik kepentingan.

Pemberhentian keanggotaan akan diinformasikan secara tertulis oleh Co-Chairs NDJSG, yang disalin ke sekretariat RSPO.

Ketua Bersama NDJSG akan mengundang konstituen dari kelompok pemangku kepentingan sektoral dan/atau geografis yang terkena dampak untuk mencalonkan perwakilan baru ke SG.

3.3 Pembubaran NDJSG

Pada saat diputuskan untuk membubarkan NDJSG, RSPO akan melanjutkan tanggung jawab penuh untuk meninjau, melaporkan dan memverifikasi implementasi prosedur RSPO untuk HFCL dengan HFCC dan menyesuaikan seperlunya dengan membuat rekomendasi kepada Komite Dewan RSPO dan Komite Eksekutif (EC) HCSA yang sesuai untuk persetujuan.

3.4 Tata Kelola

Setiap anggota harus menyatakan setiap konflik kepentingan pada hal-hal dalam agenda dan/atau hal-hal yang timbul pada awal atau selama berlangsungnya pertemuan. Jika ada konflik kepentingan, anggota yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan atau diskusi sensitif.

Semua anggota NDJSG wajib menandatangani Kode Etik untuk NDJSG.

Semua hasil dan keputusan dibuat berdasarkan konsensus², anggota harus memastikan keakuratan informasi dan bahwa interpretasi semua hasil dan keputusan NDJSG konsisten dengan konsensus yang dicapai dalam NDJSG.

Jika konsensus untuk masalah atau kriteria tertentu tidak dimungkinkan dan ini berakibat pada jalan buntu, yaitu ketika pihak-pihak yang bertikai sampai pada titik ketidaksepakatan mendasar pada topik yang signifikan dan tidak ada kemajuan yang dapat dilakukan dengan risiko keseluruhan proses menjadi terhenti atau buntu, SG akan merujuk masalah tersebut kepada Komite Dewan RSPO, yang akan berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dipertanyakan melalui konsensus (sesuai dengan Prosedur Operasi Standar RSPO untuk Penyusunan dan Peninjauan Standar (Juni 2017)).

3.4.1 Komunikasi

Sangat diharapkan bahwa Kelompok Pengarah Bersama menyelenggarakan pertemuan tatap muka 4 kali setahun atau telekonferensi jika perlu. Ketua bersama dan Sekretariat RSPO serta Sekretariat HCSA akan sering berkomunikasi terkait info terbaru.

Selama pertemuan, aturan *Chatham House* berlaku. *Chatham House Rule* bertujuan memberikan kerahasiaan kepada penutur. Aturan ini diterapkan di seluruh pertemuan sebagai bantuan untuk diskusi yang bebas, mendorong keterbukaan dan berbagi informasi. Aturan *Chatham House* berbunyi sebagai berikut:

'Ketika sebuah pertemuan, atau bagian daripadanya, diadakan di bawah Peraturan *Chatham House*, para peserta bebas untuk menggunakan informasi yang diterima, tetapi baik identitas maupun afiliasi dari para penutur, atau yang dari peserta lain, tidak boleh diungkapkan . '

Setiap komunikasi publik yang terkait dengan NDJSG dan pekerjaannya akan disepakati oleh anggota NDJSG dan disetujui oleh tim komunikasi RSPO dan HCSA.

Notulensi rapat dan klarifikasi keputusan yang dibuat oleh NDJSG harus dibagikan kepada publik tidak lebih dari satu bulan setelah pertemuan.

NDJSG akan menentukan kebutuhan untuk menerjemahkan notulensi rapat, bahan-bahan dan dokumen yang relevan, dan menjadikannya tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak terkait.

3.4.2 Perencanaan

Untuk memenuhi tugas-tugas ini dan memenuhi tujuan NDJSG, perlu untuk membuat program kerja tahunan termasuk serangkaian target atau hasil.

3.4.3 Proyek

Proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan dan/atau menerima pendanaan dari RSPO akan ditempatkan di bawah lingkup NDJSG.

- i. NDJSG dapat merumuskan proyek atau dapat menerima proyek dari pihak ketiga. Implementasi proyek dapat dialihdayakan ke Sekretariat RSPO atau ke pihak eksternal. Dalam kedua kasus tersebut, Kelompok Pengarah Bersama akan bertanggung jawab untuk mengarahkan keseluruhan proyek yang telah disetujui oleh Komite Dewan RSPO yang sesuai.
- ii. Jika suatu proyek menerima dana dari RSPO, maka Sekretariat RSPO bertanggung jawab atas perincian manajemen proyek (naratif dan finansial). Dalam situasi dimana NDJSG dan Sekretariat RSPO memiliki pendapat yang berbeda mengenai persetujuan atau kelanjutan proyek, masalah tersebut akan dibawa ke Komite Dewan yang sesuai untuk keputusan akhir.
- iii. NDJSG dapat meminta pelaksana proyek untuk memberi laporan terbaru terkait kemajuan dan kinerjanya selama pertemuan NDJSG, yaitu untuk membahas masalah atau tantangan dan mencari cara untuk mengatasinya.

3.5 Role of the RSPO Secretariat

Sekretariat RSPO akan memberikan dukungan finansial, sumber daya manusia dan logistik yang diperlukan NDJSG untuk bertemu, menjalankan tugas dan mencapai tujuannya: Sekretariat akan membantu serta mendukung NDJSG dan akan memberikan laporan teknis dari studi internal dan outsourcing kepada anggota NDJSG, kerangka acuan untuk konsultasi, dan informasi lain yang diminta oleh NDJSG untuk memenuhi tujuannya

²Consensus is defined as the lack of a sustained objection by one or more members